



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)

TAHUN 2022-2027

**DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan menggunakan pola perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk Periode 6 (enam) tahun yang disusun secara partisipatif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan rencana strategis desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, program dan kegiatan pembangunan desa. Dokumen RPJMDes ini juga diharapkan sebagai pedoman di dalam melakukan pengawasan / pengendalian pembangunan di Desa, sehingga setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada Pemerintahan Desa maupun Masyarakat.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan pembangunan di Desa. Agar pembangunan di Desa dapat berjalan dengan baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari semua pihak yang berkompeten senantiasa di harapkan untuk perbaikan.

Tanggal :.... Maret 2022
Desa.Ampel
Kepala Desa Ampel

H. SHOLEH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Tujuan

BAB II PROFIL DESA

1. Sejarah Desa
2. Kondisi Umum Desa
3. Kelembagaan Desa
4. Masalah dan Potensi Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

1. Pengkajian Keadaan Desa
2. Musyawarah Desa RPJM Desa

BAB IV : VISI DAN MISI

1. Visi Desa
2. Misi Desa
3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

BAB V : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN PROGRAM KEGIATAN

1. Arah Kebijakan Keuangan Desa
2. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perdes RPJMDes
2. Berita Acara kesepakatan Kepala Desa dan BPD tentang Penetapan Perdes RPJMDes
3. Daftar gagasan/usulan dusun
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
5. Matrik Kegiatan RPJMDes 6 Tahun
6. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Per Tahun
7. Berita Acara hasil pengkajian keadaan desa
8. Berita Acara musyawarah desa penyusunan RPJMDes
9. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJMDes
10. Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJMDes

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

2. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor Tahun tentang
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
 10. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Identifikasi dan Inventarisasi, Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

3. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ampel. ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :
 - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Ampel
 - c. Sebagai masukan penyusunan RKPDes dan RAPB Desa Ampel
2. Manfaat RPJM Desa :
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II
PROFIL DESA

1. **SEJARAH DESA**

Berdasarkan cerita turun temurun yang disampaikan oleh para tetua Desa Bahwa Desa Ampel sudah ditempati oleh orang sekitar pertengahan abad 19 masehi. Baru secara difinitip Desa Ampel ditetapkan menjadi desa setelah Kemerdekaan RI 1945. Kepala Desa pertama yang menjabat setelah era kemerdekaan yaitu Djono, Kedua Rais, Ketiga Muhadi, Keempat Drs. Sonhaji, Kelima H.Ustadzi, Keenan Drs. H.Mujib, Ketujuh Masduqi, Ke delapan H.Sholeh dan pada saat ini juga masih di jabat oleh H. Sholeh.

2. **KONDISI UMUM DESA**

Desa Ampel terletak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan memiliki luas Administrasi 1.661.027 Ha, terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu :

- 1. Dusun Krajan
- 2. Dusun Sambiringik
- 3. Dusun Pomo
- 4. Dusun Kepel

Sedangkan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Dukuhdempok
- b. Sebelah Timur : Desa Tanjungrejo
- c. Sebelah Selatan : Desa Lojejer
- d. Sebelah Barat : Desa Lojejer

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	1.661
2	Luas Persawahan	2.271
3	Luas ladang	2.425
4	Luas Perkebunan	-
5	Hutan Negara	-
6	Padang gembala	-
7	danau	-
8	Luas Kuburan	10.000
9	Luas Pekarangan	
10	Luas Taman	-
11	Luas Perkantoran	7.000
12	Luas Prasarana Umum lainnya	-
	Luas Wilayah	-

Sedangkan Tanah untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Tanah Kas Desa :	
	a. Tanah Bengkok	-152.753
	b. Tanah Titi Sara	- 73.950
	c. Kebun Desa	-
	d. Sawah Desa	-880
2	Lapangan Olahraga	- 7300
3	Perkantoran pemerintah	-0.7
4	Ruang publik/taman kota	-
5	Tempat pemakaman desa/umum	- 0.7
6	Tempat pembuangan sampah	-
7	Bangunan sekolah/perguruan tinggi	-
8	Pertokoan	-
9	Fasilitas pasar	- 1.750
10	Terminal	-
11	Tanah utk Jalan	-
12	Daerah tangkapan air	-
13	Usaha perikanan	-
14	Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	-
	Total Luas	

Jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat sebanyak 20.643 jiwa, terdiri atas laki-laki 9.875 jiwa dan perempuan 10.768 jiwa.

Jumlah Penduduk di Tiap Dusun Tahun 2015

No.	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Jumlah KK Miskin
		L	P	Total		
1	Krajan	2.676	2.435	5.111	1.311	
2	Sambiringik	2.651	2.411	5.062	1.379	
3	Pomo	1.785	3.071	4.856	791	
4	Kepel	2.763	2.851	5.614	1.461	
5						
6						
7						
8						
Jumlah						

Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	Tahun				Rata Rata % Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	
Laki laki	9.810	9.835	9.837.	9.875	
Perempuan	9.433	9.750	9.867	10.768	
Jumlah				20.643	

Sebagian besar penduduk Desa bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor lain yang Secara detail mata pencahariaan penduduk adalah sebagai berikut :

Mata Pencaharian Penduduk

(orang)

No	Mata Pencairan	Th. 2014		Th. 2015	
		L	P	L	P
1	Petani	605	507	1.792	1.001
2	Buruh tani	890	980	2.734	3.396
3	Buruh migran perempuan	-	-	-	-
4	Buruh migran laki-laki	-	-	-	-
5	Pegawai negeri sipil	73	67	75	86
6	Pengrajin industri rumah tangga	33	23	93	85
7	Pedagang	-	287		279
8	Peternak	-	-	-	-
9	Nelayan	45	-	-57	-
10	Montir	-	-	-	-
11	Dokter swasta	-	-	-	-
12	Bidan swasta	-	-	-	-
13	Perawat swasta	-	7-	-	7
14	Pembantu rumah tangga	-	-	-	-
15	TNI	10	-	10	-
16	POLRI	-	-	-	-
17	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	39	-	39	-
18	Pengusaha kecil menengah	-	-	-	-
19	Pengacara	-	-	-	-
20	Notaris	-	-	-	-
21	Dukun kampung terlatih	-	4	-	7
22	Jasa pengobatan alternatif	-	-	-	-
23	Dosen swasta	-	-	-	-
24	Pengusaha besar	-	-	-	-
25	Arsitektur	-	-	-	-
26	Seniman/artis	-	-	-	-
27	Karyawan perusahaan swasta	354	259	367	280
28	Karyawan perusahaan pemerintahan	-	-	-	-
29	Makelar/broker/mediator	-	-	-	-
30	Sopir	-	-	-	-
31	Tukang becak	-	-	-	-
32	Tukang Ojek	-	-	-	-
33	Tukang cukur	-	-	-	
34	Tukang batu/kayu	87	-	96	-
Jumlah		2.136	2.034	5.263	5.141

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		L	P	L	P		
1	Tidak tamat SD						
2	Tamat SD					753	Orang
3	Tamat SLTP					754	Orang
4	Tamat SLTA					558	Orang
5	Tamat Akademi/PT					35	Orang

Jumlah Lembaga Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Keterangan
1	TK/PAUD			- 03	
2	SD/Sederajat			- 12	
3	SLTP/Sederajat			- 02	
4	SLTA/SMK/Sederajat			- 01	
5	PTN			-	
6	PTS			-	
7	SLB			-	
	Jumlah pendidikan			-	

Jumlah Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-
2	Rumah Sakit Umum Swasta	-	-	-
3	Puskesmas Umum	-	-	-
4	Puskesmas Perawatan	-	-	-
5	Puskesmas Pembantu	-	-	-
6	Poliklinik/Balai Pengobatan	-	-	-
7	Apotik	-	-	01
8	Posyandu	-	-	20
9	Toko Obat	-	-	-
10	Balai Pengobatan Masyarakat Swasta	-	-	05
11	Gudang Menyimpan Obat	-	-	-
12	Rumah/Kantor Praktek Dokter	-	-	-
13	Rumah Bersalin	-	-	-
14	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-
15	Rumah Sakit Mata (Khusus)	-	-	-
16	Poskesdes	-	-	-
17	Puskesmasling	-	-	-
18	Poskestren	-	-	01
19	Polindes	-	-	01

Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Tahun 2015

No	Uraian	Satuan (Ha)	Satuan (Ton/Ha)
1	Padi sawah	860	6
2	Padi ladang	-	-
3	Jagung	406-	75
4	Kacang kedelai	-	-
5	Kacang tanah	-	-
6	Kacang panjang	-	-
7	Ubi kayu	-	-
8	Ubi Jalar	-	-
9	Cabe	-	-
10	Tomat	-	-
11	Sawi	-	-

12	Kentang	-	-
13	Kubis	-	-
14	Wortel	-	-

Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan Tahun 2015

No	Uraian	Satuan (Ha)	Satuan (Ton/Ha)
1	Jeruk	-	-
2	Alpokat	-	-
3	Mangga	-	-
4	Rambutan	-	-
5	Manggis	-	-
6	Pepaya	-	-
7	Belimbing	-	-
8	Durian	-	-
9	Pisang	-	-
10	Semangka	-	-
11	Melon	-	-
12	Anggur	-	-
13	Dst.....	-	-
		-	-

Luas Dan Hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas Tahun 2015

No	Uraian	Swasta/negara		Rakyat	
		Luas (Ha)	Hasil (Kw/Ha)	Luas (Ha)	Hasil (Kw/Ha)
1	Kelapa	-	-	-	-
2	Kopi	-	-	-	-
3	Cengkeh	-	-	-	-
4	Coklat	-	-	-	-
5	Tembakau	-	-	-	-
6	Tebu	-	-	-	-
7	Teh	-	-	-	-
8		-	-	-	-
9		-	-	-	-

Jenis dan Produksi Kehutanan Tahun 2015

No	Uraian	Produksi (Per Tahun)	Satuan (m3, liter, Ton)
1	Kayu Sengon	10	-
2	Madu	-	-
3	Bambu	-	-
4	Jati	05	-
5	Cemara	-	-
6	Mahoni	-	-

Jumlah Populasi Ternak

No	Uraian	Jumlah Pemilik		Jumlah Populasi	
		Tahun Lalu	Tahun Ini	Tahun Lalu	Tahun Ini
1	Sapi	-	-	443	4.550
2	Kerbau	-	-	-	-
3	Ayam kampung	-	-	33.223	33.800
4	Ayam broiler	01	450	01	450
5	Bebek	3	3	1.530	1.530
6	Kambing	437	437	101	101

Jenis Dan Alat/Sarana Produksi Budidaya dan Alat Tangkap Ikan Laut, Payau Dan Ikan Air Tawar Tahun

No	Uraian	Produksi (Per Tahun)	Satuan (Ha, Unit, Ha/m2)
1	Karamba Laut	-	-
2	Tambak	-	-
3	Jermal	-	-
4	Pancing	-	-
5	Pukat	-	-
6	Jala	-	-
7	Karamba Tawar	-	-
8	Empang/kolam	-	-
9	Danau	-	-
10	Rawa	-	-
11	Sungai	-	-
12	Sawah	-	-
13	Jala	-	-
14	Pancingan	-	-

Produksi Bahan Galian Tahun

No	Uraian	Pengelola/Pemilik	Kapasitas Produksi
1	Batu Kali	-	-
2	Batu Gunung	-	-
3	Batu Kapur	-	-
4	Pasir	-	-
5	Pasir batu	-	-
6	Minyak bumi	-	-
7	Gas alam	-	-
8	Garam	-	-

Sumber Air Bersih Tahun

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi (Baik/Rusak)
1	Mata air	-	-	-
2	Sumur gali	4850	4850	Baik
3	Sumur pompa	01	10	Rusak
4	Hidran umum	-	-	-

5	PAM	-	-	-
6	Pipa	-	-	-
7	Sungai	02	1500	Baik
8	Embung/ Telaga/ Danau	-	-	-
9	Bak penampung air hujan	-	-	-
10	Beli dari tangki swasta	-	-	-
11	Depot isi ulang	03	2750	Baik
12	Sumber lain	-	-	-

Potensi Wisata

No	Uraian	Luas (Ha)	Pemanfaatan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Jumlah Unit	Kondisi (m)		Jumlah Panjang Jalan (m)
			Baik	Rusak	
1	Drainase	3	v	v	10 Km
	Jalan Desa				
	Jalan Antar Desa	3		v	7.5 km
	Permukiman				
2	Irigasi				
	Saluran Primer	3	v	V	
	Saluran Skunder				
	Saluran Tersier	4	v	v	
	Pintu Sadap				
	Pintu Air				

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No	Uraian	Th 13	Th 14	Th 15
1	Rumah Tidak Sehat			
2	Rumah Tidak Layak Huni	130	100	82

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Jumlah Unit/Ruas	Kondisi (m)		Jumlah Panjang Jalan (m)
			Baik	Rusak	
1	Jalan Desa				
	Aspal	6	2 v	4 v	13 km
	Makadam	1000		V	1 km
	Tanah	2500		v	2,5 km

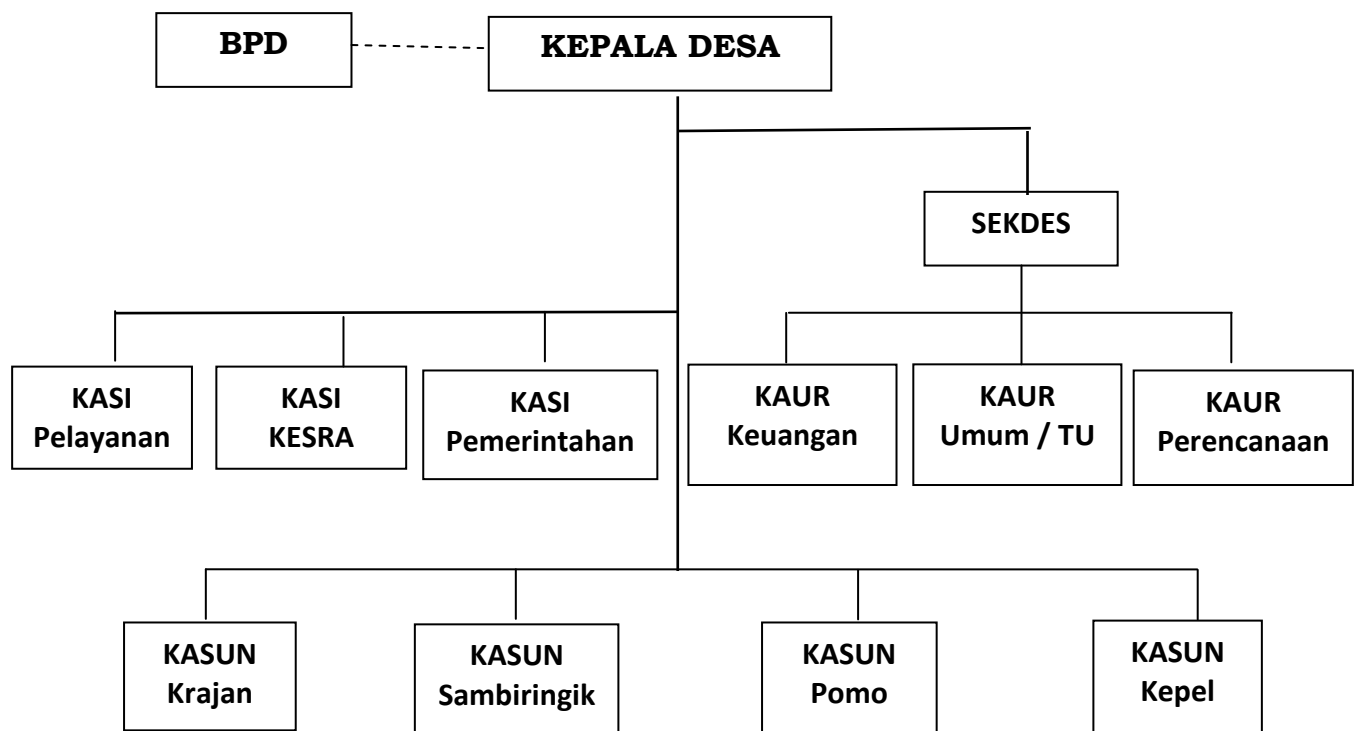
	Sirtu				
	Conblok/Paving/Beton				
2	Jalan Antar Desa				
	Aspal				
	Makadam				
	Tanah				
	Sirtu				
	Conblok/Paving/Beton				

3. **KELEMBAGAAN DESA**

Data Lembaga Pemerintahan Desa Tahun

No	Uraian	Keterangan	Pendidikan / Keterangan
1	Jumlah aparat pemerintahan Desa	32 org	
2	Jumlah perangkat desa	09 Unit Kerja	
3	Kepala Desa	Ada	SLTA
4	Sekretaris Desa	Ada	SLTA
5	Kepala Seksi Pemerintahan	Ada	S.I
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Ada	SLTA
7	Kepala Seksi Pelayanan	Ada	SLTA
9	Kepala Urusan Umum	Ada	SLTA
10	Kepala Urusan Keuangan	Ada	S.I
11	Kepala Urusan Perencanaan	Ada	SLTA
13	Jumlah Staf	09 org	Aktif
14	Jumlah Dusun di Desa	4 Dusun	Aktif
15	Jumlah Kepala Dusun yang aktif	4 Dusun	Aktif
16	Jumlah RW	25 RW	Aktif
17	Jumlah RT	122 RT	Aktif
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA		
1	Keberadaan BPD	Ada	Aktif
2	Jumlah Anggota BPD	09 org	Aktif
	LEMBAGA EKONOMI DESA		
1	Jumlah BUMDes	-Unit	
2	Jumlah Kelompok Tani	11 Kelp	Aktif
3	Jumlah Kelompok Ternak	5 Kelp	Aktif
4	Jumlah Kelompok Simpan Pinjam	1 Kelp	Aktif

Struktur Organisasi Pemerintah Desa



4. Masalah dan Potensi Desa

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim dan sebagai data tambahan dilakukan upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah dan potensi desa yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat.

a. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Pemerintah desa kurang transparan terhadap masyarakat	Aparatur pemerintahan desa lengkap sdm Memadai
2	Pemerintah desa kurang disiplin dalam menjalankan tugas	Pemerintahan desa sudah mulai aktif
3	Musyawarah desa kurang melibatkan kelompok masyarakat	Sdm masyarakat sdh meningkat
4	Pelayanan Pemdes terhadap masyarakat kurang maksimal	Adanya kantor desa,SDM yg Memadai
5	Pelayan semua pengurus Rt di Desa kurang maksimal kepada masyarakat	Rt/Rw lengkap
6	Tata ruang di Pemerintahan Desa Kurang Optimal	Pemerintahan Desa,Apartaur pemerintah desa Aktif
7	Kinerja dalam menjalankan tugasnya, BPD kurang aktif dan aspiratif	Bpd Lengkap
9	Kurang Gapura di Jalan Masuk Desa dan Dusun.	Batas Batas sudah Jelas
10	Adminstrasi Pemerintah Desa belum rapi	Penataan Arsip mulai dilakukan
11	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW	Rt RW Lengkap
12	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketentraman & keamanan warga	Linmas lengkap

b. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Jalan gang di dusun -dusun masih susah dilewati dan berlumpur waktu musim hujan	Akses jalan ada
2	Jalan Alternatif 4 dusun yang menuju sawah sulit dilewati waktu musim hujan	Akses jalan ada
3	Jalan di Rt 02/014 susah dilalui sepanjang 750 m waktu musim hujan	Akses jalan ada peLebaran jalan, ,pekerja
4	Jalan lingkungan di dusun Krajan rt04/01 susah dilalui pada musim hujan	Pekerja,tenaga Profesional
5	Jl Burdes kurang optimal sering banjir	Jl ada ,Pelebaran Jalan
6	Jalan Dsn Kepel Rw 19 sulit dilalui waktu musim hujan	Akses jalan ada
7	Pengelolaan Gumuk macan kurang maksimal untuk pengerasan jalan	Pengurus dan pengelola sudah ada
8	Alat -alat untuk mengambil pasir di gumuk macan kurang memadai	Pengurus dan pengelola sudah ada
9	Semua jalan masuk dusun kurang memadai	Jalan Lebar,Pekerja
10	Jembatan di Dusun Sambiringik P.Satimun kurang memadai	Pekerja, Tenaga professional bahan Bangunan Lokal
11	Air bersih didusun Krajan Rw 05 Kurang baik	Mata air,pekerja,tenaga professional
12	Sarana ibadah di 4 dusun kurang Memadai	Musholla,Masjid,Pekerja,Remas

c. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Kurang adanya poskamling di Semua Dusun di Desa Ampel	Patroli rutin masyarakat
2	Linmas kurang aktif dalam kinerjanya untuk Desa	Kurangnya SDM
3	Banyak Musholla di desa Ampel belum mempunyai mck dan tempat Wudu	Sarana Kurang memadai
4	Kegiatan Olah Raga masyarakat Desa Ampel Kurang Optimal	Sarana kurang memadai
5	Belum adanya BUMDesa yang menangani masalah pompanisasi, pupuk, hasil panen	Adanya Kelompok Tani
6	Belum adanya Lumbung Desa	Sarana kurang dan kelompok kurang aktif

d. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Masalah	Potensi
1	Banyak MasyarakaT RTSM yg belum terdata dengan baik	Pendata,Masyarakat
3	Pemberdayaan perempuan Kurang Maksimal	Kelompok perempuan Aktif,sdm memadai
4	Kelompok Tani di desa Ampel kurang maksimal	Kelompok Tani,Pelatih profesional
5	Kelompok Pemuda di Desa Ampel Kurak maksimal	Pemuda karang Taruna
6	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	Perangkat Desa Aktif

BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJMDES

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :

1. Proses Pengkajian Keadaan Desa
a. Musyawarah Dusun/Kelompok

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa dengan menggunakan Alat Kajian :

- 1. Sketsa Desa
- 2. Kalender Musim
- 3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW / Dusun yang telah dilakukan pada :

No	Musyawarah	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Dusun Krajan	Tgl 01.12.2015	Balai Dusun
2	Dusun Sambiringik	Tgl 07.12.2015	Balai Dusun
3	Dusun Pomo	Tgl 11.12.2015	Balai Dusun
4	Dusun Kepel	Tgl 16.12.2015	Balai Dusun

Dari hasil penjarangan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Dusun, Kemudian dituangkan dalam format daftar usulan dusun.

b. MUSYAWARAH DESA

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam musyawarah ditingkat Desa yang dilaksanakan pada 20 Desember 2015... dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun
2. Menyusun Sejarah Desa
3. Menyusun Visi dan Misi Desa
4. Membuat skala prioritas
Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.
Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
6. Menetapkan tindakan yang layak
Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan supra Desa.

2. Musyawarah Desa RPJM-Desa

Musyawarah Desa RPJM-Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM- Desa.

Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Musywarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 20 bulan Desember tahun 2015.

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbang penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari. Minggu, tanggal 20.12.2015., bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM-Desa Tahun 2016-2021.

BAB IV VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa :

“Terwujudnya Tata Pemerintahan Desa Yang Baik dan Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat “

2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat.
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa selama periode 6 Tahun

Misi pertama : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.**

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;

Misi kedua : **Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat.**

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;
- c. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;

Misi ketiga : **Pembangunan Infrastruktur Dasar.**

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan.
- b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar

BAB V

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rumusan prioritas pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 4 bidang mendasar, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Meningkatkan kualitas pendataan Desa agar diperoleh data yang valid
- b. Penambahan dan penyusunan tata ruang Desa khususnya di bagian pelayanan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa
- d. Meningkatkan pengelolaan informasi Desa dengan menggunakan internet dan website (ON LINE)
- e. Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan Desa dengan kegiatan tilik dusun seraca periodik
- f. Mengembangkan jaringan dengan penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- g. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain ; jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, lingkungan permukiman masyarakat Desa.
- b. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain ; air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa (posyandu), sarana dan prasarana kesehatan Desa.
- c. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain ; taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain : pasar Desa, pembentukan dan pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUMDesa, pembibitan tanaman pangan, lumbung Desa, pengelolaan usaha hutan Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kandang ternak, instalasi biogas.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan pelestarian lingkungan hidup antara lain : penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan mengikutsertakan dalam setiap event pelatihan

- b. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan melengkapi kebutuhan setiap pos kampling
 - c. Penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - d. Meningkatkan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**
- a. Meningkatkan kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan kerjasama dengan pihak ketiga
 - b. Meningkatkan pelatihan teknologi tepat guna dan ikutserta dalam setiap event kegiatan
 - c. Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa.
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan mempersiapkan anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelompok :
 - ✓ kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif;
 - ✓ kelompok pengrajin, kelompok pemuda.
 - ✓ kelompok perempuankelompok miskin

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN PROGRAM KEGIATAN

1. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

Prediksi Pendapatan Desa

Uraian Pendapatan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PADesa	700.000.000	750.000.000	800.000.000	850.000.000	900.000.000	950.000.000
Dana Desa	753.358.341	760.000.000	780.000.000	700.000.000	825.000.000	850.000.000
Bagi hasil pajak dan Restr	68.651.338	70.000.000	200.000.0000	250.000.000	300.000.000	350.000.000
Alokasi Dana Desa	851.013.603	870.000.000	890.000.000	900.000.000	925.000.000	950.000.000
Ban Keu dari Kab.						
Ban Keu dari Provinsi	65.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	180.000.000
Hibah						
Sumbanga Pihak III						
Pendapatan Lain-lain	30.000.000	40.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	85.000.000
JUMLAH	2.468.023.282	2.560.000.000	5.670.000.000	2.860.000.000	3.130.000.000	2.510.000.000

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APBDesa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APBDesa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif
Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakana olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa

Uraian Pengeluaran	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan	256.500.000	385.500.000	517.500.000	646.500.000	777.000.000	915.000.000
Belanja Pelaksanaan Pembangunan	427.500.000	642.500.000	862.500.000	1.077.500.000	1.295.000.000	1.525.000.000
Belanja Pembinaan Masyarakat	68.400.000	102.800.000	138.000.000	1.724.000.000	207.200.000	244.400.000
Belanja Pemberdayaan	102.600.000	154.200.000	207.000.000	258.600.000	310.800.000	366.600.000

Masyarakat						
Belanja tak terduga	10.000.000	13.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000
Lain lain						
JUMLAH	865.000.000	1.298.000.000	1.740.000.000	2.175.000.000	2.610.000.000	3.075.000.000

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

2. Program dan Kegiatan Indikatif

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi
1	Penyelenggaraan Pemerintahan		
1.1	Meningkatkan kualitas pendataan Desa agar diperoleh data yang valid		
1.1.1			
1.1.2			
1.2	Penambahan dan penyusunan tata ruang Desa khususnya di bagian pelayanan masyarakat		
1.2.1			
1.2.2			
1.3	Meningkatkan kualitas dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa		
1.3.1			

1.3.2			
1.4	Meningkatkan pengelolaan informasi Desa dengan menggunakan internet dan website Desa On Line		
1.4.1			
1.4.2			
1.5	Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan Desa dengan kegiatan tilik dusun seraca periodik		
1.5.1			
1.5.2			
1.6	Mengembangkan jaringan dengan penyelenggaraan kerjasama antar Desa		
1.6.1			
1.6.2			
1.7	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa		
1.7.1			
1.7.2			

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi
2	Pelaksanaan Pembangunan		
2.1	Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa		
2.1.1			
2.1.2			
2.1.3			
2.1.4			

2.1.5			
2.1.6			
2.2	Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan		
2.2.1			
2.2.2			
2.2.3			
2.2.4			
2.2.5			
2.2.6			
2.3	Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan		
2.3.1			
2.3.2			
2.3.3			
2.3.4			
2.3.5			
2.3.6			
2.4	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.		
2.4.1			
2.4.2			
2.4.3			
2.4.4			
2.4.5			
2.4.6			
2.5	Meningkatkan dan mengembangkan pelestarian lingkungan hidup.		
2.5.1			
2.5.2			
2.5.3			
2.5.4			
2.5.5			
2.5.6			

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi
3	Pembinaan Kemasyarakatan		
3.1	Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan mengikutsertakan dalam setiap event pelatihan		
3.1.1			
3.1.2			
3.1.3			
3.1.4			

3.1.5			
3.1.6			
3.2	Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan melengkapi kebutuhan setiap pos kampling		
3.2.1			
3.2.2			
3.2.3			
3.2.4			
3.2.5			
3.2.6			
3.3	Penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga		
3.3.1			
3.3.2			
3.3.3			
3.3.4			
3.3.5			
3.3.6			
3.4	Meningkatkan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.		
3.4.1			
3.4.2			
3.4.3			
3.4.4			
3.4.5			
3.4.6			

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi
4	Pemberdayaan Masyarakat		
4.1	Meningkatkan kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan kerjasama dengan pihak ketiga		
4.1.1			
4.1.2			
4.1.3			
4.1.4			
4.1.5			
4.1.6			
4.1.7			
4.2	Meningkatkan pelatihan teknologi tepat guna dan ikutserta dalam setiap event kegiatan		
4.2.1			
4.2.2			

4.2.3			
4.2.4			
4.2.5			
4.2.6			
4.2.7			
4.3	Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa.		
4.3.1			
4.3.2			
4.3.3			
4.3.4			
4.3.5			
4.3.6			
4.3.7			
4.4	Meningkatan kapasitas masyarakat, dengan mempersiapkan anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelompok : kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok pengrajin, kelompok pemuda.		
4.4.1			
4.4.2			
4.4.3			
4.4.4			
4.4.5			
4.4.6			
4.4.7			

3. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja yang ingin dicapai meliputi hal-hal sebagai berikut :

Matrik Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan Pemerintahan							
1	Penyusunan RKPDes Tepat Waktu	Tepat/Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Pengesahan APBDes Tepat Waktu	Tepat/Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
3	Kepemilikan Kartu Keluarga	%	85	87	90	93	96	99
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	5	5	4	4	3	3
5	Angka Putus Sekolah Dasar	%	30	25	20	15	10	5
6	Angka Putus Sekolah Menengah	%	40	35	30	25	20	15
7	Angka Putus Sekolah Atas	%	50	45	40	35	30	25
8	Penduduk Miskin	%	10	9	8	7	6	5
9	Index Kepuasan Masyarakat	A/B/C/D	B	B	A	A	A	A

2	Pelaksanaan Pembangunan							
1	Cakupan Pelayanan Posyandu	%	40	60	70	80	90	99
2	Angka Kematian Ibu dan Anak	%	0	0	0	0	0	0
3	Ruas Jalan Desa Kondisi Baik	%	50	60	70	80	90	100
4	Drainase Jalan Desa Kondisi Baik	%	50	60	70	80	90	100
5	Rasio Jaringan Irigasi	%	50	60	70	80	90	100
6	Rumah Tidak Layak Huni	%	50	60	70	80	90	100
7	Rumah Memiliki Jamban Keluarga	%	50	60	70	80	90	100
8	Cakupan Pemenuhan Air Bersih	%	50	60	70	80	90	100
9	Tempat Pembuangan Sampah	%/RT	50	60	70	80	90	100
3	Pembinaan Kemasyarakatan							
1	Partisipasi Perempuan di Pemerintahan	%	20	25	50	60	70	80
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Kemasyarakatan	%	20	25	50	60	70	80
3	Jumlah Kasus Pencurian	Kasus	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah Kasus Miras dan Narkoba	Kasus	0	0	0	0	0	0
4	Pemberdayaan Masyarakat							
1	Cakupan Jumlah KPMD	%	25	30	35	40	45	50
2	Proses Pendirian Pembentukan BUMDes	%	50	100	100	100	100	100
3	Cakupan Pelatihan Aparat Pemerintah Desa	%	40	50	60	70	80	90
4	Cakupan Pelatihan Kelembagaan Masyarakat	%	40	50	60	70	80	90

BAB VII

PENUTUP

Demikian RPJMDes ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Tahun 2016 - 2021 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDesa Tahun 2016 - 2021 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

KEPALA DESA AMPEL

H. S H O L E H

2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten JEMBER.

Ditetapkan di Ampel

Pada Tanggal: Maret 2022

KEPALA DESA AMPEL

H. SHOLEH